

BAB III

PANDANGAN NASIONALISME LIEM KOEN HIAN

3.1 Pandangan Liem Koen Hian terhadap Nasionalisme Cina

Diberlakukannya Undang-undang Agraria 1870 serta *passenstelsel* yang merupakan sistem pas atau sistem izin ketika akan keluar dari wilayah tempat tinggalnya, dan sistem kampung atau pemukiman (*wijkenstelsel*),⁴⁷ maka dorongan nasionalisme peranakan Tionghoa mulai muncul. Nasionalisme pada peranakan Tionghoa pada mulanya yaitu rasa terikat dengan tanah air leluhurnya yaitu Cina. Bangkitnya nasionalisme Cina ini berkaitan erat dengan kondisi dalam negeri di Hindia Belanda di samping menyebarnya nasionalisme Cina dari Tiongkok,⁴⁸ yaitu adanya revolusi pimpinan Sun Yat Sen di Cina yang memberikan pengaruh bagi peranakan Tionghoa.

Pendidikan barat yang didapatkan oleh peranakan Tionghoa dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menjadikan salah satu awal munculnya pemikiran bahwasannya kesenjangan sosial dan munculnya penolakan dari orang peranakan Tionghoa terkait diberlakukannya surat pas. Terdapat kebijaksanaan pemerintah kolonial lain yang tidak kalah menonjol seperti adanya sistem *opsir* atau kapitan Cina, yaitu sistem administrasi bagi golongan Tionghoa yang dipantau oleh pemerintah kolonial, sistem pemukiman, dan pas jalan, menjadikan golongan Tionghoa terisolasi dan tidak berbaur dengan golongan lain. Pemerintah kolonial tidak semata-mata membuat kebijakan karena kebijakan tersebut mempunyai

⁴⁷ Riyadi et al., *Peran Etnis Tionghoa Dalam Nasionalisme Kebangsaan Indonesia*. hlm.17

⁴⁸ Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia 1900-2002*. hlm. 3

perannya tersendiri, yaitu untuk memudahkan administratif yang bisa dipantau langsung oleh pemerintah kolonial bagaimana perkembangan golongan Tionghoa tersebut pada lingkungannya, lalu kebijakan ini dapat memberikan keuntungan untuk menjaga stabilitas sosial bagi pemerintahan kolonial.

Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) akhirnya didirikan pada 1901 oleh masyarakat peranakan Tionghoa Hindia Belanda yaitu organisasi peranakan Tionghoa yang dapat dikatakannya sebagai organisasi sosial dan pendidikan.⁴⁹ Ketegangan yang terjadi antara Eropa dan pedagang Tionghoa terjadi, sejak 1901 sejalan dengan perkembangan THHK khususnya pada pendidikan serta pengajaran, mulailah berdirinya organisasi dagang, Siang Hwee atau Sing Boe (1908). Pengaruh revolusi dari Sun Yat Sen, maka tumbulah rasa nasionalisme dalam kalangan etnis Tionghoa yang menjadikan mereka tidak begitu memberikan loyalitasnya kepada pemerintah Hindia Belanda bahkan melakukan aksi boikot terhadap perusahaan dagang Belanda pada 1902 oleh pedagang Tionghoa Surabaya, serta kejadian pada Imlek 1912 yaitu pemerintah Hindia Belanda melarang pengibaran bendera nasionalis Tiongkok dan mengakibatkan boikot oleh para pedagang Tionghoa di Surabaya.⁵⁰

Tokoh peranakan Tionghoa mulai berkecimpung di dunia politik berkaitan dengan adanya nasionalisme Cina Sun Yat Sen. Tokoh peranakan yang dimaksud salah satunya adalah Liem Koen Hian. Disusul dengan munculnya berbagai pergerakan yang dilakukan oleh peranakan Tionghoa seperti Tiong Hoa Hwee Koan (perkumpulan Tionghoa), Siang Hwe atau perkumpulan dagang Tionghoa

⁴⁹ Retnaningtyas Dwi Hapsari, "Bibit Nasionalisme Di Kalangan Penduduk Tionghoa Di Indonesia," *Politica* 7, no. 2 (2016): 255–270. hlm. 257

⁵⁰ Benny G. Setoino, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. hlm. 334

dan golongan Sin Po. Liem pada saat itu pernah bergabung dengan golongan Sin Po, salah satu perannya adalah menyebarkan semangat tentang nasionalisme Tionghoa di Sumatera dengan cara menyerukan bahwa peranakan Tionghoa tidak ikut serta dalam badan politik kolonial akibat ketidakpuasan pada pemerintah. Program kolonial yang menjadi salah satu pendorong gerakan kampanye ini adalah munculnya kebijakan milisi atau pertahanan pada masa politik etis untuk pertahanan Hindia Belanda atau *Indie weerbaar*.⁵¹

Undang-undang kekawulaan Belanda yaitu WNO (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*) pada 10 Februari 1910, menjadi pendorong aksi penolakan adalah bahwa WNO menyatakan bahwa seluruh orang Tionghoa keturunan kedua yang lahir di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang adalah kawula Belanda. Peraturan tersebut ditolak oleh kalangan masyarakat Tionghoa karena kesadaran nasionalisme mereka terhadap nasionalisme Cina semakin kuat, adanya penolakan masyarakat Tionghoa yang menolak akan peraturan yang mewajibkan harus mengikuti wajib militer untuk membela Hindia Belanda, dan berpandangan bahwa mereka adalah seorang yang asing di Hindia Belanda.⁵²

Liem mengartikan bahwa kesetiaan terhadap negeri leluhurnya yaitu negeri Cina merupakan kesetiaan tanpa syarat. Merasa bahwa sebagai seorang peranakan Tionghoa, yang merupakan bagian dari golongan Tionghoa, Liem mempunyai rasa berkewajiban pada negeri Cina untuk mengabdikan. Keyakinan Liem bahwa peranakan Tionghoa bisa menjadi bagian dalam membantu negeri Cina untuk menjadi negara

⁵¹ Muhammad Gibran Humam Fadlurrahman, "Pendirian Technische Hoogeschool Te Bandoeng: Sekolah Tinggi Teknik Untuk Hindia Belanda," *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* 14, no. 2 (2023): 154–174. hlm. 160

⁵² Benny G. Setoino, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. hlm. 468

yang kokoh, karena jika negeri Cina menjadi negara yang mempunyai kekuatan maka akan bisa melindungi golongan Tionghoa termasuk peranakan Tionghoa, sehingga nasib peranakan Tionghoa bisa jelas dimanapun mereka berada.⁵³

Pernah menjadi pemimpin redaksi Sinar Sumatra hingga 1921 dan melanjutkan kariernya di *Pewart* Soerabaia sebagai pemimpin redaksi sejak November 1921 yang dimiliki oleh The Kian Sing. Liem pada saat itu masih berpegang teguh pada pandangan nasionalisme Cina dan kritis terhadap Belanda, di samping hal tersebut seorang pemimpin kampanye terkait anti Undang-undang Kawula Belanda yang bernama Hau Tek Kong menjadi pihak yang menerima Kawula Belanda dan setia kepada Belanda, yang membuat Liem geram atas keputusan Hau Tek Kong, hal ini menjadikan Liem dinilai sangat anti terhadap Belanda.

Berhentinya Liem dari *Pewart* Soerabaia pada Maret 1925, sejalan dengan konflik antara Liem dengan direktur koran tersebut yaitu The Kian Sing akibat Liem yang sangat anti Belanda hingga iklan tidak dipasang lagi di *pewart* Soerabaia, akibat kejadian tersebut maka tanda berakhirnya sikap nasionalisme Cina Liem Koen Hian. Mei 1925 Liem menjadi pemimpin redaksi di surat kabar *Soera Publiek* hingga 1929 awal. Ide barunya yaitu *Indiesch Burgerchap*, yaitu konsepnya yang memandang bahwa Hindia Belanda adalah kampung halaman bagi peranakan Tionghoa yang berada di Hindia Belanda bersamaan dengan konsekuensi atas harus adanya persamaan hak dan kewajiban antara peranakan Tionghoa di Hindia Belanda dengan warga asli Hindia Belanda.⁵⁴

⁵³ Hian, "Oendang Oendang Karahajatan Olanda."

⁵⁴ Suryadinata, *Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary*, vol. 1, p. . hlm. 576-577

Aktivitasnya di dunia jurnalistik dan antara 1929-1932, Ia bekerja di surat kabar Sin Tit Po sejalan dengan perkembangan konsep *Indiesch Burgerchap* yang pada akhir 1920-an menjadi *Indonesierschap*. Perbedaan *Indiesch Burgerchap* (kewarganegaraan Hindia Belanda) dan *Indonesierschap* (kewarganegaraan Indonesia) yaitu pada penyebutan wilayah untuk kewarganegaraan. Ketika Ia menjadi pemimpin redaksi Sin Tit Po, terjadi perubahan pandangan politiknya. Perubahan haluan Liem sudah mulai terlihat salah satunya adalah dengan adanya pemikiran Tjipto, maka Liem sadar terkait konsep bangsa Tjipto akan sulit diwujudkan ketika dalam masyarakat peranakan Tionghoa sudah mempunyai berbagai macam haluan kebangsaan yang berbeda, dikarenakan Cina Totok pada priode awal telah mempunyai haluan nasionalisme, yakni nasionalisme Cina yang sebelumnya telah diserukan oleh Sun Yat Sen yaitu tokoh revolusi Cina yang berpandangan bahwa Cina sudah selayaknya mengembangkan rasa nasionalisme untuk menyatukan semua masyarakat untuk menghadap berbagai agresi imperialis,⁵⁵ baik bagi mereka yang di dalam negeri maupun bagi Cina perantauan.

Sejak awal berdirinya organisasi Tiong Hoa Hwee Koan, peranakan yang berkeinginan memisahkan diri mulai muncul, serta munculnya perbedaan antara Cina Totok dan peranakan. Liem berpandangan bahwa integrasi antara peranakan ke dalam suatu masyarakat asli Hindia Belanda dinilai lebih mudah jika dibandingkan dengan Cina Totok. Seperti pada tulisannya yang dimuat pada surat kabar Sin Tit Po 2 April 1930 bahwa peranakan tidak akan bisa terus menganggap Indonesia sebagai negeri asing bagi peranakan.

⁵⁵ Suyanto, "Soekarno and Sun Yat Sen Struggling for Liberty and Nasionalism." hlm. 62

Sikap yang terus ditunjukkan Liem Koen Hian menjadikan konsep nasionalismenya yaitu nasionalisme Indonesia atau Indonesierschap mendapat kecaman karena Liem dinilai sudah mengubah haluan seiring bertambahnya waktu. Liem menjawab kecaman tersebut sesuai dengan tulisannya pada surat kabar Sin Tit Po, 25 Agustus 1936 yang menegaskan bahwa berubahnya Haluan yang sebelumnya nasionalisme Cina menjadi nasionalisme Indonesia, itu sama saja karena jika dilihat dari aspeknya. Mengingat bahwa kelompok Sin Po merupakan pemegang haluan nasionalisme Cina dan Liem sangat menentang kelompok yang berhaluan nasionalisme Belanda berkaitan dengan UU Kekawulaan Belanda (WNO) seperti dari kelompok CHH, tidak luput dari kritikan Liem kepada para pemimpin CHH yang seolah memberikan anjuran bagi peranakan Tionghoa untuk melihat kepentingan dari sisi Belanda. Seperti yang ditulisnya pada Sin Tit Po, 12 April 1932 “Haloean Kita” yang bisa diartikan bahwa kepentingan peranakan Tionghoa yang banyak terikat dengan pemerintah Belanda, seakan ingin mempertahankan pemerintahan Belanda tetap berkuasa selama-lamanya.

3.2 Peralihan Pandangan Liem Koen Hian terhadap Nasionalisme

Diawali dengan rasa kekecewaan saat ia sadar bahwa sudah sewajarnya untuk anti terhadap Belanda yang merupakan penjajah ketika berada di lingkungan yang sangat pro terhadap nasionalisme Cina namun ternyata berkata sebaliknya, kesadaran akan kesenjangan yang nampak bagi golongan Tionghoa akibat dari peraturan pemerintahan Hindia Belanda, kesadaran identitas yang dimilikinya sebagai golongan peranakan Tionghoa yang diartikan ia mempunyai darah keturunan penduduk asli Indonesia, adanya antagonism rasial serta diskriminasi,

dan sadar bahwa sangatlah penting suatu kesatuan antar etnis untuk melawan kolonialisme.

Berhentinya Liem Koen Hian dari *Pewartar Soerabaia* pada Maret 1925 yang disebabkan karena sikap Liem yang dianggap sangat anti Belanda dan menyinggung Belanda, direktur koran yaitu *The Kian Sing*, serta perankan yang memasang iklan di *Pewartar Soerabaia*.⁵⁶ Penilaian inilah yang membuat Liem berpindah dan akhir atas sikap nasionalisme Cina yang Liem miliki. Peralihan haluan ini bukan semata-mata karena masalah pribadi namun sebagai perubahan yang Liem sadari bahwa nasionalisme ini bisa dipahami.

Perubahan pandangan atau perubahan haluan Liem Koen Hian tentunya akan bersebrangan dengan paham *Sin Po* yang kukuh pada pandangan nasionalisme Cina. Liem menilai bahwa pandangan golongan *Sin Po* sudah tidak sesuai.⁵⁷ Di tahun 1928, Liem secara publik di *Soera Publiek* mengemukakan pandangan atau haluan bagi peranakan Tionghoa, yaitu mengajak peranakan Tionghoa untuk bergabung dalam kebangsaan Indonesia dan bersama ikut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.⁵⁸

Berkaitan dengan memperjelas pandangan nasionalisme Indonesia maka Liem pada *Sin Tit Po* 1930, dengan tajuk artikel “Haloean Kita” yaitu Liem melihat nasionalisme Cina menjadikan peranakan Tionghoa tidak melihat kepentingan nyata di Indonesia, tempat dimana peranakan Tionghoa hidup dan bekerja dan

⁵⁶ Suryadinata, *Tokoh Tionghoa Dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien*. Hlm. 67.

⁵⁷ Liem Koen Hian, “Rangka Toedjoean: Satoe Program Van Actie Boeat Indonesier Dan Tionghoa Bersama-Sama,” dalam *Soera Publiek* (Surabaya, Februari 1, 1928).

⁵⁸ Liem Koen Hian, “Toedjoean Kita,” dalam *Soera Publiek*, 2 Februari 1928.

bahwa Cina adalah negara asing bagi peranakan di Hindia Belanda serta sudah selayaknya peranakan tidak seperti orang asing di Hindia Belanda. Kedudukan peranakan Tionghoa bisa diwujudkan dengan keikutsertaan pada usaha mewujudkan perjuangan cita-cita Indonesia merdeka.⁵⁹

Kesenjangan yang dialami peranakan Tionghoa saat pendudukan Belanda didorong dengan politik dari Hindia Belanda yaitu sistem bersifat apartheid,⁶⁰ sistem ini menjadikan masyarakat Hindia Belanda dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa atau Belanda, golongan Timur Asing diantaranya Arab, India, Cina dan lainnya, juga terdapat golongan penduduk asli Indonesia yang menyebabkan pemisahan etnis yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda, dapat dikatakan sebagai cara pemerintah Hindia Belanda memecah belah penduduk di tanah jajahannya.

Liem Koen Hian semakin menyadari akan identitas sebagai keturunan peranakan Tionghoa yang tinggal di Indonesia, Liem terikat oleh dua kebudayaan yang berbeda, maka akan menciptakan perasaan bahwa Indonesia adalah rumah semua etnis. Sejalan dengan pemikiran Liem yang terus berkembang ia mulai menerima konsep dari Tjipto Mangunkusumo terkait pembentukan suatu bangsa dari berbagai orang yang menganggap bahwa Hindia Belanda (Indonesia) adalah tanah air mereka serta mendukung pembentukan bangsa Indonesia merdeka dengan berbagai elemen yang salah satunya itu baik penduduk asli Indonesia, peranakan Tionghoa, Arab, India maupun Indo Belanda. Pengaruh lingkungan sosial serta

⁵⁹ Liem Koen Hian, "Haloean Kita," *Sin Tit Po* (Surabaya, April 14, 1930). 1930

⁶⁰ Abdul Muntholib, "Melacak Akar Realisme Di Indonesia Dalam Prespektif Historis," *Forum Ilmu Sosial* 35, no. 2 2008: hlm. 107.

politik pada kondisi Indonesia yang berada pada genggaman bangsa asing tersebut, maka dorongan atas bersatunya berbagai ras maupun etnis serta budaya yang ada di Indonesia untuk mencapai kemerdekaan adalah hal yang tepat.

Perubahan pandangan atau haluan Liem juga disebabkan oleh adanya antagonisme rasial, di mana hal ini menyadarkan bahwa terjadinya ketegangan yang melibatkan prasangka, perlakuan tidak adil atau diskriminasi rasial, yaitu sebagai akibat dari terjadinya pemberontakan komunis dalam 1926-1927 di Madiun yang menjadikan keadaan pada saat itu sangat tidak kondusif.⁶¹ Menjadikan *Indonesierschap* sebagai bahan untuk menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia.⁶² Diskriminasi yang timbul menjadikan Liem semakin kritis dan melihat bahwa pentingnya suatu kesatuan antar etnis untuk perjuangan melawan kolonialisme, bahkan pada perkembangannya keterlibatannya pada pers telah membawa pada perkembangan gerakan nasional Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, kompleksitas dari beragam identitas yang merupakan suatu dinamika dari keberagaman dari suatu bangsa.

Interaksi yang biasa ia lakukan dengan golongan Tionghoa dimanfaatkannya untuk menjadikan dirinya sebagai jembatan bagi golongan Tionghoa dan rasa nasionalisme Indonesia, jembatan yang akan menciptakan inklusi atau lingkungan yang terbuka dengan keberagaman serta integrasi atau pembauran antara golongan asli dengan peranakan.

⁶¹ Dwiki Anugrah Gustiawan Putra Hatama, Anwar, and La Batina, "Perkembangan Komunisme Di Indonesia Tahun 1914-1927," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO (JPPS-UHO)* 7, no. 1 (2022): 57–72. hlm. 63.

⁶² Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti, 1984, hlm. 53.

3.3 Nasionalisme Indonesia Liem Koen Hian

Munculnya prasangka rasial kepada pemerintahan Belanda serta konsepsi mengenai nasion Indonesia yang diperjuangkan oleh Indische Patrij (IP) pada kalangan Tionghoa peranakan. Nasion didefinisikan sebagai arti rasa persatuan yang berarti seluruh masyarakat maka peranakan Tionghoa adalah bagian dari persatuan. Awal 1928, Soeera Publiek merupakan surat kabar Tionghoa peranakan yang pada saat itu pemimpin redaksinya adalah Liem Koen Hian, gagasan yang dikemukakan Liem yaitu “Kewarganegaraan Hindia Belanda” atau *Indisch atau Indier Burgerschap* untuk golongan peranakan Tionghoa yang digunakan untuk melawan WNO (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*) atau kekawulaan Belanda.

Liem percaya bahwa peranakan Tionghoa yang berhaluan Indonesia atau memandang Hindia Belanda sebagai tanah air mereka sudah sepatutnya mendapatkan status hukum penduduk asli Indonesia dan bukan Belanda. Sejalan dengan hal tersebut maka peranakan Tionghoa mempunyai kewajiban yang sama seperti orang Indonesia dan tidak ada kepraktisan yang akan didapatkan dari asimilasi dengan Belanda dan berstatus sama dengan Eropa bagi peranakan Tionghoa kecuali sudah terlibat pada perkara kriminal. Munculnya konsep “kewarganegaraan Hindia Belanda” bisa terjadi karena ada kekecewaan mereka terhadap Cina, nampak pada 1927 Cina tidak cukup kuat untuk bisa memberikan perlindungan bagi peranakan Tionghoa.

Gagasan “kewarganegaraan Hindia Belanda” dikembangkan menjadi “kewarganegaraan Indonesia” yaitu *Indonesierschap* pada awal tahun 1930-an.⁶³ Munculnya gagasan “kewarganegaraan Indonesia” tentunya memberikan gemanya bagi untuk kalangan mahasiswa peranakan Tionghoa di Belanda, yaitu CHH (Chung Hwa Hui) Nederland menjadi dua kelompok berbeda di akhir 1931. Menjadikan CHH Nederland yang cenderung berpihak pada nasionalisme Cina dan anggota yang meisahkan diri dari CHH Nederland ini mendirikan sarakat Peranakan Tionghoa Indonesia yang dipimpin oleh Tjoan Sik Ien, Tan Ling Djie dan Teng Tjin Leng sebagai organisasi baru dan memperjelas nasionalisme Indonesia, memihak Perhimpunan Indonesia, serta menganggap Indonesia adalah tanah air dan negara mereka.⁶⁴

Pemikiran jauh kedepan Liem dengan pandangannya menjadi bagian dari bagaimana ia berubah haluan dari nasionalisme Cina menuju nasionalisme Indonesia. Liem yang menawarkan konsep nasionalisme Indonesia mendapatkan kecaman yang ia tanggapi dengan pembelaan pada *Sin Tit Po*, 25 Agustus 1936 yang terlampir pada Prisma 1983, yang dapat diartikan bahwa Liem yang sebelumnya berhaluan nasionalisme Cina menjadi nasionalisme Indonesia, yang sebelumnya berobjekkan Cina berubah mejadi Indonesia dengan alasan bahwa Liem tinggal di Indonesia, Liem menegaskan bahwa isi nasionalisme sama hanya berbeda objek.⁶⁵ Maksud dari berbeda objek yang Liem kemukakan adalah bahwa nasionalisme tetaplah nasionalisme namun hanya berbeda orientasi yang

⁶³ Liem Koen Hian, “Ka Indonesierchap,” ada *Sin Tit Po*, 2 April 1930.

⁶⁴ Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan Di Jawa 1917-1942*. hlm. 82

⁶⁵ Riyadi et al., *Peran Etnis Tionghoa Dalam Nasionalisme Kebangsaan Indonesia*. hlm.39

sebelumnya berobjekkan Cina namun pada perkembangan ini ia berobjekkan Indonesia karena kesadarannya bahwa ia lahir dan tumbuh di Indonesia.

Sejak tahun 1932, perjuangan yang dilakukan Liem Koen Hian bisa beriringan dengan perjuangan para pemuda Indonesia sejalan dengan jurang antara Belanda dan Indonesia semakin menegang. Rapat di Surabaya pada 8 Mei 1932 diselenggarakannya rapat yang diprakarsai oleh Sin Tit Po dan dukungan surat kabar Soeara Omoem, organisasi resmi Persatuan Bangsa Indonesia, memilih Liem sebagai pemimpin rapat. Rapat ini memuat berbagai organisasi yang termasuk diantaranya adalah berbagai partai politik serta persatuan olahraga dari Bumiputera, peranakan Tionghoa, Arab.⁶⁶ Rapat ini menghasilkan pembentukan Commite van Actie Persatuan Bangsa Indonesia dengan tujuan melaksanakan aksi boikot berbagai pertandingan yang dilaksanakan oleh SVB (Soerabaia Voetbal Bond).

Rapat dilaksanakan karena adanya pertandingan sepak bola dengan SVB yang dikenal sebagai persatuan sepak bola Surabaya. Penolakan SVB untuk memberikan koran atau pers non Belanda di Surabaya tiket gratis yang mengakibatkan terjadinya protes dari peranakan. Akibatnya pers peranakan mengancam akan memutuskan hubungan dan memboikot pertandingan yang diselenggarakan SVB. Pihak SVB yaitu Bekker yang menuliskan karangan yang menyatakan bahwa tidak dibutuhkannya kerjasama dengan orang kulit berwarna. Hal tersebutlah yang mengakibatkan pers peranakan menggunakan tulisan Bekker

⁶⁶ Benny G. Setoino, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. hlm. 499

sebagai kampanye anti terhadap Belanda karena telah merendahkan dan rasis terhadap orang kulit berwarna.⁶⁷

Rapat juga dimanfaatkan sebagai wadah bagi para nasionalis Indonesia untuk mengecam pemerintahan kolonial Belanda serta boikot yang dijadikan masalah politik. Akibat hal tersebut Liem Koen Hian ditahan serta dipenjarakan, sejalan dengan hal tersebut maka terjadilah protes yang dilakukan kaum nasionalis, terutama dari pihak pengurus Pusat Persatuan Bangsa Indonesia dan M.H Thamrin sebagai Ketua Permuafakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia di Volksraad, dan akhirnya Liem dibebaskan.⁶⁸

Mengingat kembali pemikirannya yaitu *Indonesiërschap* yang dipengaruhi oleh pemikiran ajaran kebangsaan Tipto Mangunkusumo mengenai cita-citanya dalam membentuk sebuah bangsa Indonesia tidak hanya terdiri penduduk asli Indonesia saja namun bagi mereka yang menganggap tanah air Indonesia adalah tanah airnya termasuk peranakan Tionghoa, Indo Belanda, peranakan Arab dan lainnya.

Liem berpendapat bahwa pemisahan antara peranakan Tionghoa dengan Tionghoa totok bisa dilakukan karena keduanya mempunyai perbedaan cara hidup yang berlainan.⁶⁹ Kedekatan antara penduduk asli Indonesia dan peranakan lebih terlihat jika dibandingkan dengan totok karena totok berpandangan bahwa Cina adalah tanah airnya yang pada kenyataannya adalah negara asing bagi mereka. Liem tidaklah memberikan anjuran bagi peranakan Tionghoa untuk berbaur bersama

⁶⁷ Aji, *Tionghoa Surabaya Dalam Sepak Bola 1915-1942*. hlm.114

⁶⁸ Benny G. Setoino, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*.hlm.499-500

⁶⁹ Ibid. hlm. 499

masyarakat penduduk asli Indonesia dengan cara mengganti nama, berpindah agama.⁷⁰ Pernikahan maupun membuang adat istiadat yang sebelumnya dilakukan mereka,⁷¹ yang berarti Liem bahwa hal-hal tersebut adalah bagian dari pribadi setiap orang dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang akan dibangun dengan segala perbedaan tersebut.

Anjuran golongan Sin Po yang mengatakan bahwa sudah selayaknya golongan Tionghoa untuk berada pada barisan nasionalisme Cina, ternyata tidak sejalan dengan pemikiran Liem. Pemikiran Liem menyatakan bahwa nasionalisme diibaratkan sebagai suatu senjata, jika nasionalisme yang dipilih oleh peranakan Tionghoa yang berada di perantauan tidak berada di negeri Cina itu sendiri maka nasionalisme Cina tidaklah mendapatkan manfaatnya, karena nasionalisme yang bisa dikenakan sebagai senjata dalam artian bisa mengusir musuh. Peranakan Tionghoa yang mengikuti nasionalisme Cina tidaklah berpengaruh bagi peranakan Tionghoa di perantauan serta untuk menghindari perasaan imperialis yang akan timbul ketika hanya keinginan untuk mendapatkan suatu sumber dayanya saja ketika berada di perantauan tanpa menghiraukan keadaan yang terjadi di wilayah tersebut.

Tidak hanya menentang pendapat golongan Sin Po, Liem juga menentang pimpinan dari CHH yang dinilainya sangat pro terhadap Belanda. Kritikan Liem ini tidaklah tanpa dasar karena para pemimpin CHH menyarankan bagi peranakan Tionghoa untuk melihat kepentingan dari sudut pandang Belanda. Nasionalisme

⁷⁰ Liem Koen Hian, "Menjesatkan Pambatja," dalam *Sin Tit Po*, 7 April 1930.

⁷¹ Benny G. Setoino, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. hlm. 500

yang dimiliki Liem Koen Hian tidak berhenti begitu saja, ia pun mendirikan sebuah partai untuk mewadahi peranakan Tionghoa yaitu Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 1932 dengan berorientasi pada nasionalisme Indonesia, dalam mendukung rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan.

Keaktifan Liem Koen Hian ini membawanya pada lingkungan para pemimpin perjuangan Indonesia, karena dengan hal tersebutlah peranakan Tionghoa bisa membaurkan dirinya sebagai bagian dari Indonesia. Gagasan yang terus membawa Liem pada nasionalisme terus ia tanam pada keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari keberagaman dari berbagai suku, etnis yang menyadari bahwa Indonesia adalah tanah airnya. Tujuan bersama dan sebutan Indonesia bukan hanya untuk orang Indonesia asli namun bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi peranakan. Sudah selayaknya sebagai peranakan Tionghoa harus ikut dalam memerdekakan Indonesia.⁷²

Liem menyatakan gagasannya lagi terkait perbedaan peranakan Tionghoa dan totok, peranakan Tionghoa adalah mereka yang merupakan keturunan campuran dari kedua ras yang berbeda, tinggal di Indonesia, berbahasa Indonesia, hidup seperti orang Indonesia asli, mencari nafkah serta akan tetep tinggal sampai generasi selanjutnya dan di kuburkan di Indonesia, tentunya sangat berbeda dengan kalangan Tionghoa totok yang merupakan ras keturunan asli Cina.

Meleise atau krisis ekonomi yang menimpa Indonesia hingga 1935,⁷³ adalah salah satu hal yang menampakkan persamaan satu nasib anatra rakyat Indonesia asli

⁷² "Causerie Pikiran Indonesia Dan Peranakan Tionghoa," dalam *Djawa Tengah*, 11 Oktober 1932.

⁷³ Diska Meizi Arinda, Urif Saraswati, and Abdul Muntholib, "Krisis Ekonomi Di Banyumas 1930-1935," *Journal of Indonesian History* 6, no. 1 (2017): 12–20. hlm. 13

dengan peranakan Tionghoa, itu dilihat dari kedaan golongan totok yang bisa menghadapi krisis ini dengan pulang kembali ke negara asalnya yaitu pulang kembali ke negeri Cina untuk bertemu kembali dengan keluarganya sedangkan bagi peranakan mereka sudah menjadi bagian dari negeri yang ia tempati dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Kondisi tersebut menjadikan PTI mempunyai ruang tersendiri dari totok dan hanya peranakan Tionghoa saja yang bisa menjadi anggota PTI dan bagi yang menjadi anggota luar biasa diduduki oleh mereka yang bukan peranakan Tionghoa. Kesadaran politik yang terus berkembang setelah terjadinya krisis ekonomi terus menjalar di kalangan peranakan Tionghoa, bahkan dengan adanya krisis ekonomi maka memunculkan solidaritas non Eropa dan menunjukkan sisi ketidak berdayaan pemerintah kolonial yang bisa dimanfaatkan karena hal tersebutlah maka pemerintah kolonial kehilangan kepercayaan masyarakat.

Sejalan dengan fasisme yaitu suatu ideologi politik bersifat otoriter, dengan nasionalisme ekstrim.⁷⁴ Fasisme di Jerman yang ditandai dengan keberhasilan merebut kekuasaan oleh rezim fasis di bawah pimpinan Adolf Hitler yaitu Nazi Jerman pada 1933, dengan mendapatkkn dukungan dari Mussolini seorang diktator Italia serta di Asia Pasifik oleh rezim militer Jepang,⁷⁵ kondisi tersebut sangat jelas menunjukkan bahaya timbulnya fasisme. April 1937 berdiri Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia yang berkembang menjadi partai nasionalis yang aktif berkampanye anti fasisme, Gerindo juga membuka keanggotaannya untuk peranakan termasuk bagi peranakan Tionghoa karena menurut Amir Syarifuddin,

⁷⁴ Heru Maruta, "Fasisme," *Jurnal Istishaduna* 15, no. 1 (2021): 15–24.

⁷⁵ Kamaruddin Hasan, "Analisis: Propaganda Fasisme," *Propaganda* 1, no. 1 (2011): 1–9. hlm. 2

bahwa Gerindo memiliki definisi bahwa kebangsaan dari seseorang tidaklah ditentukan oleh darah, bentuk muka, warna kulit, tetapi berdasarkan tiga ciri yaitu faktor tujuan, cita-cita serta keinginan bersama untuk menjadi bangsa. Reaksi dari peranakan atas berdirinya Gerindo dengan sambutan baik, bahkan Liem Koen Hian berabung dengan Gerindo untuk terus bergabung pada perjuangan bangsa Indonesia.

Sejak tahun 1942 kedudukan Jepang, pemerintahannya menyebabkan partai politik dan organisasi yang sebelumnya ada dibubarkan. Banyaknya penangkapan yang begitu intensif guna mencegah kedatangan bangsa lain serta para pejuang bangsa Indonesia untuk merebut kekuasaan kembali, cara yang dilakukan Jepang diantaranya yang diutamakan adalah untuk mengontrol masyarakat Indonesia dengan pengetatan pers maupun bidang jurnalistik, para redaktur dan pekerja pers juga ikut digeledah untuk mencegah hal buruk yang kemudian hari akan meimpa Jepang bagi mereka yang mencurigikan dan dianggap ancaman akan mendapatkan hukuman. Liem Koen Hian sebagai peranakan dan sebagai tokoh pers pernah ditangkap dan ditahan di tahanan Kenpetai Jepang namun berhasil diselamatkan, bahkan pada perkembangannya usaha Jepang untuk mendapatkan simpati dari tokoh-tokoh Indonesia maupun peranakan termasuk Liem Koen Hian dijadikan dewan-dewan daerah yakni *Tyuuu Sangi-kai* atau *Chuo Sang-in* yaitu penasehat dan menjawab pertanyaan dari Saiko Sikikan (pemimpin), penguasa tertinggi militer serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan kemenangan

atas perang Asia Timur Raya. Lembaga diciptakan oleh pemerintahan militer Jepang sejak 5 September 1943.⁷⁶

Tyuuu Sangi-kai mempunyai bagian dari perjuangan kemerdekaan di mana adanya lembaga ini telah secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi para tokoh nasionalis sebagai ruang berdiskusi dan menjalin hubungan bersama bangsa Indonesia, lingkup ini juga memungkinkan terealisasinya perencanaan para tokoh nasionalis dalam menuju kemerdekaan walau dalam kekangan Jepang. Anggota *Tyuuu Sangi-kai* sebagian terus berkiprah dalam perjuangan mendapatkan kemerdekaan walau setelah bubarnya *Tyuuu Sangi-kai* pada 1945, beberapa anggota *Tyuuu Sangi-kai* kemudian bergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) termasuk Liem Koen Hian yang ikut serta sebagai anggota.

Menyongsong suatu kemerdekaan, 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada untuk memenuhi janji Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso tentang kemerdekaan Indonesia, menyerukan pembentukan BPUPKI atau Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Dokuritu Zunbi Tyoosa Kai dengan pengumuman anggotanya pada 29 April 1945, termasuk Liem menjadi anggota dari BPUPKI serta pada perkembangannya menjadi anggota KNIP.⁷⁷

⁷⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila)* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2012). Hlm. 245.

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Himpunan Risalah Sidang BPUPKI 29 Mei -16 Juli 1945 Dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 18&19 Agustus 1945* (Jakarta, 1998).